

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH, KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
(Studi Pada SKPD)**

**Oleh : Yuli Artika  
Pembimbing : Zulbahridar dan Hariadi**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
e-mail : [yuli913@ymail.com](mailto:yuli913@ymail.com)*

*The Influence Applied Of The Local Government finance Accounting System, The  
Human Resources Capacity And Utilization Of Information Technology Toward  
Of Quality Of Financial Statement At The Local Government  
Of Rokan Hulu Regency (Case Study At SKPD)*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the influence of applied the local government finance accounting system, human resources capacity and utilization of information technology to the quality of financial statements at the local government of rokan hulu regency. The population in this study are officials department, expenditures and receipts. The method that using in this study is purposive sampling method. The data of this study using primary with directly giving the questionnaire and analyzed using SPSS 17. The data of hypothesis were analyzed with multiple linear regression analyze approach. The result of test hypothesis shown that the applied of the local government finance accounting system, the capacity of human resources and utilization of information technology gave the influence of the quality of financial statements at the regional government of Rokan Hulu regency. The coefficient of the determination shown that the influence of independent variables to dependent variable is 63,2% and 36,8% is affected by the other variables that not included in this regression model.*

**Keyword:** *Quality of Financial Statements, Local Government finance Accounting System, The Human Resources Capacity And Utilization Of Information Technology.*

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Kieso, Weygant &

Warfird, 2007:2). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2001:7).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2009 sampai tahun 2012 masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan pada tahun 2013 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain, penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi (Emilda, 2013 dan Soimah, 2014).

Halim (2007) menyatakan bahwa untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat

komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak (Halim, 2004:168).

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 pasal 232). Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat

memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan (Mardiasmo, 2004).

Selanjutnya variabel Kapasitas sumber daya manusia juga merupakan faktor untuk mencapai laporan keuangan yang berkuaitas. Kapasitas sumber daya manusia menurut Robbins (2006:52) adalah kemampuan berbagai individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kapasitas sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Yoseprinaldi,2013).

Selain kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor utama untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkuaitas. Teknologi

Informasi (Maritin: 1999) adalah teknologi yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi.

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001:89).

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan pablik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Emilda Ihsani (2014) dan Soimah (2014)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1) Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah?, 2) Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, 3) Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, 3) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Permendagri No 64 tahun 2013). Nordiawan dkk (2009:151) mendefinisikan laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan

SAL), (3) Laporan Posisi Keuangan, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami.

### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Meliputi Sebagai Berikut: (1) Produser Akuntansi Penerimaan Kas, (2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, (3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah, (4) Prosedur Akuntansi Selain Kas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan

gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Nuraini (2013:3) Sumber daya manusia adalah keseluruhan orang yang diperkerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta. Sedangkan Alwi (2008 :6) mendefinisikan Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang disebut karyawan. Menurut Robbins (2006 : 52) Kemampuan sumber daya manusia adalah sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan..

Sumber daya manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi (Griffin, 2004 dalam Delanno & Deviani, 2013). Menurut Darwanis dan Mahyani dalam Soimah (2014) mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menunjang organisasi dalam karya, bakat, keaktivitas dan dorongan. Betapapun sempurna aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat dicapai.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Jogiyanto (2008:3) Teknologi Informasi (IT) adalah sub-sistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sedangkan Kadir dan Triwahyuni (2003:2) Teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomas *et.al.* (1991) dalam Wijaya (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (*input*), teknologi keluaran (*output*), teknologi perangkat lunak (*software*), teknologi penyimpanan (*storage*), teknologi telekomunikasi (*telecommunication*) dan teknologi mesin pemroses (*process*) (Kadir, 2005:5). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat setingkat eselon II, dan III yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan SKPD dan bendahara pengeluaran / penerimaan SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan SKPD. Maka, jumlah responden pada penelitian ini adalah 104 orang, yaitu 26 SKPD Kabupaten Rokan Hulu dikalikan 4 orang yang menjadi responden di setiap SKPD.

Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Kepala SKPD dan Subbagian Keuangan SKPD di Kabupaten Rokan Hulu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

a = konstanta

$\beta_1$ = koefisien regresi untuk variabel independen penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah

$\beta_2$  = koefisien regresi untuk variabel independen kapasitas sumber daya manusia

$\beta_3$  = koefisien regresi untuk variabel independen pemanfaatan teknologi informasi

$X_1$ = penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah

$X_2$  = kapasitas sumber daya manusia

$X_3$ = pemanfaatan teknologi informasi

e = kesalahan pengganggu (error).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### a. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP 71 tahun 2010). Pengukuran Variabel ini diukur dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

#### b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ( $X_1$ )

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menggunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah. Perlakuan akuntansi terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana (Kepmendagri No 29 tahun 2002). Variabel ini diukur dengan indikator

(1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), (2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya, (3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik (Permadi, 2013).

**c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X<sub>2</sub>)**

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Yosepsinaldi, 2013). Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Variable ini di ukur dengan Indikator rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004 dalam Delanno & Deviani, 2013).

**d. Pemanfaatan teknologi informasi (X<sub>3</sub>)**

Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang di gunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi (Martin, 1999). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara

elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Variabel ini diukur dengan Indikator penggunaan komputer dan jaringan internet (Soimah, 2014).

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel descriptive statistics yang menunjukkan angka minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel. 1**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Y	82	30.00	45.00	39.1463	3.35961
X1	82	32.00	50.00	41.6585	3.59773
X2	82	24.00	40.00	33.4756	3.39653
X3	82	18.00	35.00	29.1829	3.03530

Sumber: Data olahan SPSS 16

**a. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X<sub>1</sub>)**

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41.6585 dengan standar deviasi sebesar 3.59773. Nilai rata-rata 41.6585 menunjukkan bahwa besarnya penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebesar 41.6585. Nilai rata-rata dan nilai standar devias penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

**b. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X<sub>2</sub>)**

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33.4756 dengan standar deviasi sebesar 3.39653. Nilai rata-rata 33.4756 menunjukkan bahwa besarnya kapasitas sumber daya manusia sebesar 33.4756. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi aksesibilitas ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

**c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>3</sub>)**

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29.1829 dengan standar deviasi sebesar 3.03530. Nilai rata-rata 29.1829 menunjukkan bahwa besarnya pemanfaatan teknologi informasi sebesar 29,91.

Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi transparansi dan akuntabilitas ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

**d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum 45 dan nilai rata-rata (*mean*) 39.1463 sebesar dengan standar deviasi sebesar 3.35961. Nilai rata-rata 39.1463 menunjukkan bahwa besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 39.1463. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi transparansi dan akuntabilitas ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

**Hasil Pengujian Kualitas Data**

**Hasil Uji Validitas Data**

Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pertanyaan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5%  $df = n-2$  (82-2) = 80  $r_{tabel} = 0,217$ .

**Hasil Uji Reliabilitas Data**

**Table 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Y	0,790	0,6	Reliabel
X1	0,763	0,6	Reliabel
X2	0,742	0,6	Reliabel
X3	0,721	0,6	Reliabel

Sumber: Data olahan SPSS 16



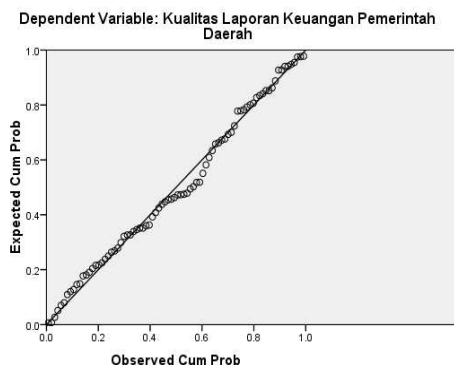
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi antara lain 0.790, 0.763, 0.742, 0.721 . Dari semua nilai ketigat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data olahan SPSS 16

Dari gambar.1 dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji  $R^2$  dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua

variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

**Tabel 3**  
**Nilai *Tolerance* dan VIF**  
**Coefficients<sup>a</sup>**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

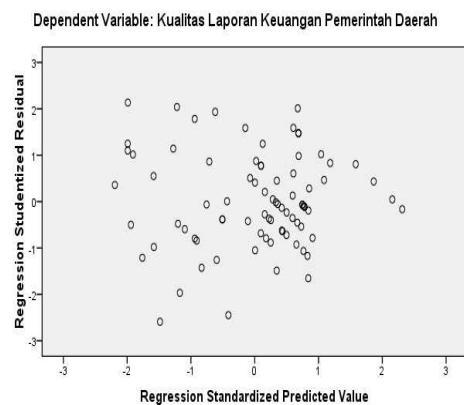
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	.463	2.162
X2	.523	1.912
X3	.694	1.441

Sumber: Data olahan SPSS 16

#### Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar.2 dibawah ini menunjukkan gambar hasil uji heterokedastisitas, dari gambar grafik *Scatterplot* di atas ini terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas karena titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

**Gambar 2**  
**Hasil uji Heterokedastisitas**  
Scatterplot



Sumber: Data olahan SPSS 16

## Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel. 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.795 <sub>a</sub>	.632	.618	2.07547	1.891

Sumber: Data olahan SPSS 16

Dari tabel 4 diperoleh nilai Durbin Watson terletak antara -2 dan 2 =  $-2 < 1,891 < 2$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

## Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel. 5**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.999	2.875		2.086	.040
X1	.453	.094	.485	4.806	.000
X2	.208	.094	.210	2.214	.030
X3	.251	.091	.227	2.750	.007

Sumber: Data olahan SPSS 16

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 5,999 + 0,453X_1 + 0,208 X_2 +$$

$$0,251 X_3 + e$$

## Hasil Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit)

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai R square ( $R^2$ ) sebesar 0,632 dan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.618. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 63,2 %. Sedangkan sisanya 36,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**Tabel. 6**  
**Hasil uji koefisien determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.795 <sub>a</sub>	.632	.618	2.07547	1.891

Sumber: Data olahan SPSS 16

**Tabel. 7**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	578.254	3	192.751	44.747	.000 <sub>a</sub>
Residual	335.990	78	4.308		
Total	914.244	81			

Sumber: Data olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel 7 diketahui F hitung (44,747) > F tabel (2,722) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Hipotesis Pertama

Untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah hipotesisnya adalah sebagai berikut

$H_{01}$  : tidak ada pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_{a1}$  : terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel. 5 di atas dapat dilihat bahwa  $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$  yaitu  $4,806 > 1,991$  dengan nilai signifikansi diperoleh adalah  $0,000 < 0,05$ . Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu: penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Mardiasmo (2004: 34) yang mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

### **Hipotesis Kedua**

Untuk variabel Kapasitas sumber daya manusia hipotesisnya adalah sebagai berikut

$H_{02}$  : tidak ada pengaruh Kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_{a2}$  : terdapat pengaruh Kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel. 5 di atas dapat dilihat bahwa  $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$  yaitu  $2,214 > 1,991$  dengan nilai

signifikansi diperoleh adalah  $0,030 < 0,05$ . Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu:  $H_{a2}$  Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah dengan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi (Ariesta, 2013), sehingga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) yang mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Hipotesis Ketiga**

Untuk variabel Kapasitas sumber daya manusia hipotesisnya adalah sebagai berikut

$H_{03}$  : tidak ada pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_{a3}$  : terdapat pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel.5 di atas dapat dilihat bahwa  $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$  yaitu  $2,750 > 1,991$  dengan nilai signifikansi diperoleh adalah  $0,007 < 0,05$ . Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu  $H_{a1}$  Pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini konsisten dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan ke-majuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi ke-uangan daerah kepada pelayanan publik salah satunya adalah dengan menghasilkan laporan keuangan yang berbasis teknologi informasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Rokan Hulu hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , dimana  $t_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa Kapasitas sumber daya manusia terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Rokan Hulu hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , dimana  $t_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang telah ditentukan. Sehingga, semakin baik

kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

3. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Rokan Hulu hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , dimana  $t_{hitung}$  yang diperoleh lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang telah ditentukan. Sehingga, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Saran

1. Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya SKPD yang terdapat di kabupaten Rokan Hulu saja namun diperluas menjadi seluruh SKPD yang terdapat di provinsi Riau.
2. Penulis mengajukan saran kepada kabupaten Rokan Hulu hendaknya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu lebih meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, yang secara langsung berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dengan cara mengadakan pelatihan tentang sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah kepada para pegawai, untuk membentuk sebuah

pemahaman yang lebih kepada pegawai, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kabupaten Rokan Hulu berkualitas.

3. Dari nilai *R square* hasil perhitungan dapat diperoleh 63,2 % sedangkan sisanya 36,8 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga pada penelitian yang akan datang perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel lainnya seperti sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafarudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Bpfe- Yogyakarta: 2008.
- Bastian, Indra Dan Soeprianto, Gato. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat : 2003.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Bpfe Yogyakarta
- Botutihe, Tutun Hermawanto. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo*. Jurnal . Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Delanno , Galuh Fajar Dan Deviani. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sdm, Pemanfaatan Ti Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Wra, Vol. 1, No. 1 April 2013
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 16*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: 2009.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, edisi revisi. Jakarta. Salemba empat.
- Ihsanti , Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota)*. Artikel . Universitas Negeri Padang. Padang
- Indriasari ,Desi Dan Nahartyo, Ertambang . 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal . Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Palembang

- Jugiyanto Hm, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Andi : 2008.
- Kadir , Abdul Dan Triwahyuni Terra Ch, *Pengenalan Teknologi Informasi* , Yogyakarta, Andi Offset : 2003.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sector Pablik*, Yogyakarta. Andi Offset :2004
- Mahmudin, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Upp Stim Ykpn: Yogyakarta.
- Munawir, 2001. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nuraini, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,Pekan Baru, Yayasan Ainisyam : 2013.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidiah Rahmawati, 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ponamon, Irene Fransisca. 2013. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Manado*. Jurnal
- Permadi , Angga Dwi . 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Soimah,Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Skripsi. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Sawir, A, 2001, *Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Weygandt, Jerry J and Kieso, Donald E and Kimmel, Paul D, *Accounting Principles Pengantar Akutansi*, Edisi

Ketujuh, Penerbit Salemba  
Empat, Jakarta, 2007.

Wahana Komputer. 2003. *Panduan  
Aplikatif Sistem Akuntansi  
Online Berbasis Komputer*.  
Penerbit Andi, Yogyakarta.

Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem  
Informasi Akuntansi* .Jakarta :  
Erlangga.

Yosefrinaldi, 2013. *Pengaruh  
Kapasitas Sumber Daya  
Manusia Dan Pemanfaatan  
Teknologi Informasi Terhadap  
Kualitas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Dengan  
Variabel Intervening Sistem  
Pengendalian Intern  
Pemerintah( Studi Empiris  
Pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan Dan Aset Daerah  
Se-Sumatra Barat)*. Artikel .  
Universitas Negri Padang.  
Padang.

<http://pekanbaru.bpk.go.id>

<http://www.informatika.lipi.go.id>